

ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS DI PROPINSI SUMATERA UTARA

PRAWIDYA HARIANI RS¹

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email : prawidyahrs@gmail.com**

AULIA RIZKY SYAHPUTRI

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Tingkat Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan diiringi dengan semakin meningkatnya Ketimpangan Ekonomi yang dilihat dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara. Tindak Kriminalitas tertinggi adalah Kasus Pencurian, kasus Penganiayaan dan Kasus Narkoba. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data sekunder dengan runtun waktu yaitu pada tahun 2002 sampai 2013, yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Model analisis data adalah model ekonometrika dengan persamaan Analisis Linier Sederhana Metode Kuadrat Terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*) dengan mempergunakan E-Views 8.0 sebagai pengolah data penelitian.

Berdasarkan hasil estimasi bahwa ketimpangan ekonomi (GR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen penulis dapat mengetahui pengelompokkan kabupaten/kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah tindak kriminal serta ketimpangan ekonomi dan jumlah tindak kriminal yang dibagi menjadi 4 kuadran.

Kata Kunci : Ketimpangan Ekonomi (Gini Ratio/GR), Tingkat Kriminalitas

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup, kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Akibat adanya perbedaan dan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia yang diikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Todaro, 2011).

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Selama proses pembangunan Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini dalam bidang ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menunjukkan

adanya peningkatan. Jika tahun 2009, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% maka pada tahun 2010 dan tahun 2011 naik menjadi 6,0% dan 6,3%. Tetapi dari sisi sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia sesuai kebutuhan mereka sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah.

Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan yang merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan dan mendominasi pengaruh yang menguntungkan terhadap pertumbuhan daerah. Selain pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi, proses pembangunan juga bertujuan untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Ketimpangan ini dibuktikan oleh data BPS 2004, 2005 dan 2006. 40 persen populasi penduduk miskin ternyata hanya menikmati 20,80 persen (2004), 18,81 persen (2005) dan 19,75 persen (2006) dari pendapatan. Tidak sebanding dengan 20 persen penduduk kaya yang bisa menikmati pendapatan 42,07 persen (2004), 44,78 persen (2005), dan 42,15 persen (2006). Itu sebabnya Gini Ratio Indonesia masih berada di angka 0,32 (2004), 0,363 (2005), 0,33 (2006), 0,364 (2007), 0,35 (2008), 0,37 (2009), 0,38 (2010), 0,41(2011), 0,41(2012), 0,413(2013).

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus index Williamson, dapat diketahui tingkat ketimpangan di Sembilan provinsi di Indonesia selama tahun 2002-2014 mengalami keadaan yang berfluktuasi. Bahwa antara Sembilan provinsi di Indonesia selama periode 2002-2014 tingkat pemerataan pendapatan berada ditingkat ketimpangan sangat tinggi yaitu nilai indeks lebih besar dari 0,39 atau mendekati 1(satu). Indeks Williamson pendapatan terendah terdapat pada tahun 2002 dan 2010 yaitu sebesar 0,91%. Dan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2008 dengan nilai indeks Williamson pendapatan sebesar 0,99%.

Adanya ketimpangan yang mencolok antar berbagai daerah (*inter-regional disparity*). Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan lainnya. Ditinjau dari proporsinya, tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi tingkat kemiskinan di Jawa. Selain itu kesenjangan dapat dilihat pula dari perbedaan angka indeks pembangunan manusia yang mencolok antar daerah, termasuk antar perkotaan dan perdesaan.

Pada bulan maret 2014 di Indonesia jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang, bila dibandingkan dengan September 2013 terjadi penurunan dari 28,60 juta orang dan persentasenya juga menurun dari 11,46% menjadi 11,25%(Kepala BPS,Suryamin,2014).

Masalah-masalah ekonomi seperti ini salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dimasyarakat. Meskipun Indonesia merupakan Negara yang cukup kaya, akan tetapi distribusi pendapatan tidak merata, maka kemiskinan tidak dapat dihindari. Dan jika ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin memperburuk keadaan perekonomian.

Pembangunan yang tidak merata dan terpusat pada beberapa sektor ekonomi di beberapa wilayah dengan sumber daya yang tinggi menyebabkan tingkat ketimpangan ekonomi di Sumatera masih tinggi walaupun Sumatera Utara mengalami Pertumbuhan Ekonomi.

Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya.Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim

antarlain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2011).

Tabel 1
Indeks Gini Ratio Sumatera Utara

Provinsi	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumatera Utara	0,327	0,307	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33	0,354

Sumber :BPS Indonesia tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat angka tingkat ketimpangan pendapatan Sumatera Utara berdasarkan Indeks Gini Ratio setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 0,35 pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar 0,33.

Disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2000-2010 yang dihitung menggunakan Williamson Index menunjukkan kecenderungan kenaikan. Pada tahun 2010, Williamson Index untuk Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 0,7148 atau jauh meningkat dibandingkan tahun 2000 yang hanya sebesar 0,5749. Kondisi disparitas pendapatan ini cukup mengkhawatirkan mengingat angka indeks yang semakin mendekati 1 menunjukkan disparitas yang semakin lebar.

Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban yang terus meningkat karena banyak penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumberdaya yang potensial terus berpindah ke daerah maju sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah pusat pertumbuhan mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih tinggi karena didukung oleh sumber daya potensial yang telah berpindah tersebut.

Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi ini ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Semakin besarnya angka ketimpangan pembangunan antar daerah dapat menimbulkan kecemburuan masyarakat antar daerah sehingga memicu masyarakat untuk melakukan tindakan kriminalitas.

Tabel 2
Angka Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2012

Jenis Kriminal	Jumlah dalam Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kasus Narkoba	2.461	2.802	2.718	2.728	2.078
Kasus Pembunuhan	138	114	127	152	160
Kejahatan Seksual	911	984	1.065	1.156	1.026
Kasus Penganiayaan	6.098	6.526	6.869	7.362	7.053

Kasus Pencurian	8.805	9.089	10.245	8.832	8.343
Kasus Penipuan	1.361	1.670	2.260	2.635	2.060
Kasus Pemalsuan Uang	21	22	13	31	17
Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	31.895	35.336	41.806	47.156	43.234
Jumlah Penduduk	12.834.371	13.201.715	13.339.353	13.103.596	13.215.401
Angka Kriminalitas	0.24 %	0.26%	0.31%	0.35%	0.32%

Sumber :Polda Sumatera Utara tahun 2012

Dari tabel 2 dapat kita lihat bahwa angka kriminalitas pada tahun 2010 sebesar 0,31% dengan jumlah penduduk di Sumatera Utara sebesar 13.339.353 dan meningkat pada tahun 2011 tingkat kriminalitas menjadi 0,35% dengan jumlah penduduk 13.103.596 dan pada tahun 2012 tingkat kriminalitas menurun menjadi 0,32% dengan jumlah penduduk 13.215.401. Tetapi tingkat kriminalitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013 sebesar 0,42%.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat ketimpangan dari ekonomi khususnya ketimpangan pendapatan wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara?
2. Bagaimana perkembangan tingkat kriminalitas wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh tingkat ketimpangan ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Sumatera Utara?

B. KAJIAN TEORITIS

1. Definisi Ketimpangan

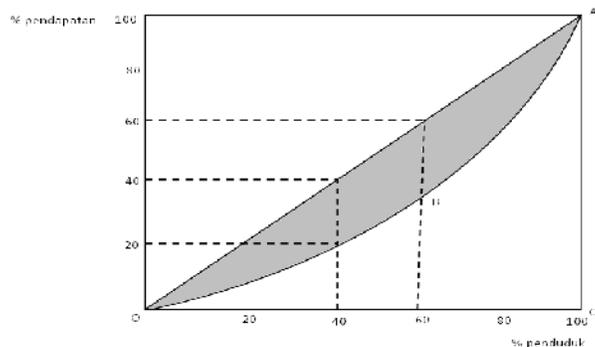
Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (*disparity*). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Terdapat berbagai macam alat yang dapat dijumpai dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk (*Distribution Income Disparities*), diantaranya yaitu :

a. Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya, satu tahun.

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.



Gambar 1
Kurva Lorenz

b. *Gini Index/Gini Ratio*

Gini index adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Menurut Gini setiap kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang selanjutnya disebut angka Gini dengan cara membagi luas yang dibentuk kurva Lorenz tersebut dengan total pendapatan. Maksimum dan minimum nilai G adalah : $0 \leq G \leq 1$.

Untuk menghitung *Gini Index* yaitu :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1})(Q_i + Q_{i-1})$$

dimana :

$G = Gini Index$

$P_i =$ Persentase kumulatif jumlah penduduk sampai kelas ke- i

$Q_i =$ Persentase kumulatif jumlah pendapatan sampai kelas ke- i

$i = 1, 2, 3, \dots, n$

$G = 0$, *Perfect Equality*

$G = 1$, *Perfect Inequality*

c. *Regional Income Disparities*

Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah di dalam wilayah suatu negara. Jeffrey G. Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Williamson menggunakan

Williamson Index (Indeks Williamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas bahwa yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok. Formulasi Indeks Williamson secara statistik adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}}{Y}, 0 < IW < 1$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = Pendapatan per kapita daerah i

Y = Pendapatan per kapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Angka koefisien Indeks Williamson adalah $0 < IW < 1$. Jika Indeks Williamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau semakin merata dan sebaliknya angka yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Walaupun indeks ini memiliki kelemahan yaitu sensitive terhadap defenisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan artinya apabila ukuran wilayah yang digunakan berbeda maka akan berpengaruh terhadap hasil perhitungannya, namun cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan

Simon Kuznets (Todaro, 2011)) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (ketimpangan membesar), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik” (Hipotesis Kuznets).

Pembuktian hipotesis Kuznets dilakukan dengan membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan (Indeks Williamson). Jika kurva yang dibentuk oleh hubungan antara variabel tersebut menunjukkan kurva U-terbalik, maka hipotesis Kuznets terbukti bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi ketimpangan yang membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya.

Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Di samping itu, imbalan yang diperoleh dari investasi di sektor pendidikan mungkin akan meningkat terlebih dahulu, karena sektor modern yang muncul memerlukan tenaga kerja terampil, namun imbalan ini akan menurun karena penawaran tenaga terdidik meningkat dan penawaran tenaga kerja tidak terdidik menurun. Jadi, walaupun Kuznets tidak menyebutkan mekanisme yang dapat menghasilkan kurva U-terbalik ini, secara prinsip hipotesis tersebut konsisten dengan proses bertahap dalam pembangunan ekonomi. Namun terlihat bahwa, dampak pengayaan sektor tradisional dan modern terhadap ketimpangan pendapatan akan cenderung bergerak berlawanan arah..

3. Definisi Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartono, 1999: 122).

Kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.

Tindakan criminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, norma agama yang berlaku dimasyarakat. Bentuk-bentuk tindak criminal seperti :

- a. Pencurian
- b. Tindak asusila
- c. Pencopetan
- d. Penjambretan
- e. Penodongan dengan senjata tajam/api
- f. Penganiayaan.
- g. Pembunuhan
- h. Penipuan

Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang disajikan adalah *time series* yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau lokasi tertentu namun dihimpun pada tahun yang berbeda (t-1). Data dihimpun pada tahun 2008 hingga 2012 yang dipublikasikan oleh *Badan Pusat Statistik*. Adapun variabel yang akan diamati adalah variabel kriminalitas.

Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Sebagai variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat Kriminalitas variabel bebasnya adalah tingkat ketimpangan ekonomi, maka model ekonometrik dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot GR + \varepsilon_t$$

Dimana :

- | | |
|--|--|
| Y | =Tingkat Kriminalitas |
| GR | =Gini Ratio |
| α_0 | = Konstanta |
| $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ | = Parameter dari setiap variabel bebas |
| ε_t | = <i>Error term</i> |

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara berda di bagian barat Indonesia, terletak pada garis $1^0 - 4^0$ Lintang Utara dan $98^0 - 100^0$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas daratan provinsi Sumatra Utara adalah 71.680,68 Km² , sebagian besar berada di daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil

berada di pulau Nias, pulau – pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun di bagian Timur pantau pulau Sumatera.

Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.620,70 Km² , atau sekitar 9,23% dari total luas Sumatera utara, diikuti kabupaten Langkat dengan luas 6.263,29 Km², kemudian kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 Km² atau sekitar 6,12%. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kota Sibolga dengan luas 10,77 Km² atau sekitar 0,02% dari total luas wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematang Siantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.

2. Gambaran umum Perkembangan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan, khususnya bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi.

Tabel 3
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (rupiah)

Kabupaten	2012	2013	2014
N i a s	13 292 683,44	14 046 053,44	14 721 177,28
Mandailing Natal	14 905 350,88	15 667 155,30	16 504 535,54
Tapanuli Selatan	22 872 795,73	26 646 496,05	27 609 224,74
Tapanuli Tengah	15 060 605,34	15 490 681,66	15 925 280,03
Tapanuli Utara	14 689 627,65	15 325 027,06	15 975 302,08
Toba Samosir	22 627 824,46	23 547 425,35	24 389 705,91
Labuhanbatu	37 390 288,20	38 824 307,49	40 049 808,47
Asahan	26 071 623,54	27 292 587,28	28 610 102,70
Simalungun	22 970 279,16	24 005 942,78	25 114 584,15
D a i r i	17 034 206,17	17 778 556,49	18 567 807,86
K a r o	27 883 731,14	28 686 548,87	29 602 056,17
Deli Serdang	25 081 088,95	26 746 146,72	28 152 036,58
Langkat	21 108 029,03	22 089 564,01	23 013 524,29
Nias Selatan	10 317 868,43	10 667 245,44	11 004 991,99
Humbang Hasundutan	16 678 315,99	17 427 293,75	18 141 947,58

Pakpak Bharat	13 354 137,37	13 845 068,48	14 358 561,12
Samosir	17 314 335,31	18 240 966,90	19 230 167,84
Serdang Bedagai	22 552 933,32	23 756 289,99	24 871 008,33
Batubara	46 269 548,75	47 653 057,62	49 076 570,28
Padang Lawas Utara	23 409 740,64	24 274 392,66	25 197 442,62
Padang Lawas	22 245 858,43	23 035 418,82	23 816 142,18
Labuhan batu Selatan	44 360 748,40	45 977 153,96	47 362 270,79
Labuhan batu Utara	35 228 102,86	37 031 332,05	38 623 362,75
Nias Utara	12 638 996,25	13 313 603,74	13 881 474,21
Nias Barat Kota	10 539 422,63	11 022 720,67	11 496 535,46
Sibolga	28 751 706,91	30 349 623,08	32 004 513,35
Tanjung balai	24 497 211,84	25 560 430,31	26 673 436,94
Pematang siantar	28 089 277,98	29 413 826,89	30 994 487,33
Tebing Tinggi	18 332 850,03	19 168 156,84	19 921 408,08
M e d a n	48 932 722,19	51 041 410,76	53 623 967,96
B i n j a i	21 819 826,88	22 817 958,89	23 827 106,93
Padang sidimpuan	14 794 434,65	15 359 716,25	15 868 743,95
Gunung sitoli	17 445 888,76	18 262 046,50	19 117 332,99
Sumatera Utara	28 036 879,18	29 343 040,07	30 482 590,52

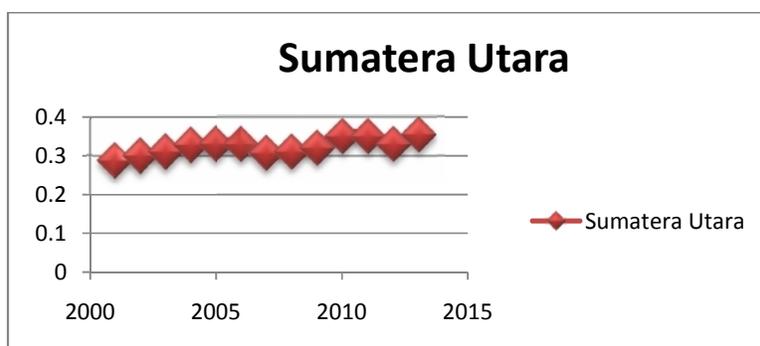
Sumber : BPS Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi setiap tahun mengalami peningkatan dapat dilihat dari nilai PDRB per/kapita Sumatera Utara atau Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, nilai PDRB untuk provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sebesar 28.036.879,18 tahun 2013 naik menjadi 29.343.040,07 dan tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 30.482.590,52.

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara nilai PDRB tertinggi di Kota Medan dengan nilai 53.623.967,96 tahun 2014 dan diikuti dengan Kabupaten Batubara dengan nilai 49.076.570,28 tahun 2014 lalu Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan nilai 47.362.270,79 tahun 2014.

3. Gambaran Umum Ketimpangan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Ketimpangan ekonomi yang tinggi di suatu Provinsi itu disebabkan oleh salah satunya pembangunan ekonomi yang tidak merata di setiap kabupaten/kota tersebut. Ketimpangan ekonomi ini diwakili dengan *Gini Ratio* yang persebarannya dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber : BPS Sumatera Utara

Gambar 2
Grafik Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara

Ketimpangan ekonomi untuk Provinsi Sumatera Utara Mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013 sebesar 0,354 sementara tahun sebelumnya yakni tahun 2012 mengalami penurunan 0,336. Dan kembali mengalami peningkatan tahun 2010 dan 2011 masing-masing 0,25, *Gini Ratio* Sumatera Moderat diangka 0,3.

Tabel 4
Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
Nias	0,280	0,223	0,325	0,261	0,272073
Mandailing natal	0,225	0,244	0,324	0,190	0,245907
Tapanuli Selatan	0,184	0,225	0,290	0,169	0,217259
Tapanuli Tengah	0,257	0,327	0,395	0,259	0,309331
Tapanuli Utara	0,255	0,293	0,374	0,251	0,293467
Toba Samosir	0,256	0,222	0,286	0,180	0,236017
Labuhan Batu	0,203	0,234	0,271	0,232	0,234894
Asahan	0,214	0,255	0,334	0,202	0,251054
Simalungun	0,249	0,240	0,298	0,230	0,254145
Dairi	0,222	0,227	0,336	0,187	0,242972
Karo	0,209	0,186	0,189	0,098	0,170531
Deli Serdang	0,192	0,219	0,290	0,194	0,223683
Langkat	0,213	0,256	0,293	0,219	0,245240
Nias Selatan	0,248	0,226	0,365	0,188	0,256785
Humbang Hasundutan	0,264	0,244	0,355	0,206	0,266947
Pakpak Bharat	0,252	0,246	0,375	0,236	0,277290
Samosir	0,273	0,252	0,447	0,288	0,31493
Serdang Bedagai	0,209	0,204	0,231	0,161	0,201439
Batubara	0,195	0,247	0,296	0,208	0,236614
Padang Lawas Utara	0,212	0,208	0,356	0,155	0,232818
Padang Lawas	0,231	0,240	0,314	0,199	0,245717
Labuhan Batu Selatan	0,217	0,170	0,214	0,108	0,177388
Labuhan Batu Utara	0,206	0,188	0,247	0,164	0,201195
Nias Utara	0,252	0,239	0,380	0,247	0,279398

Nias Barat	0,266	0,334	0,357	0,197	0,288288
Sibolga	0,220	0,249	0,243	0,165	0,219155
Tanjung Balai	0,241	0,283	0,372	0,287	0,295698
Pematang Siantar	0,182	0,236	0,277	0,159	0,213465
Tebing Tinggi	0,232	0,253	0,289	0,193	0,241684
Medan	0,173	0,202	0,261	0,172	0,202029
Binjai	0,219	0,250	0,256	0,197	0,230403
Padang Sidempuan	0,233	0,230	0,269	0,184	0,228976
Gunung Sitoli	0,375	0,317	0,413	0,276	0,345460
Sumatera Utara	0,35	0,35	0,33	0,354	0,350083

Sumber: BPS Sumatera Utara

Tahun 2013 ketimpangan ekonomi tertinggi terjadi di Samosir 0,288% dan Tanjung Balai sebesar 0,287% sementara ketimpangan ekonomi yang paling rendah bahkan mendekati nol (pemerataan sempurna) terjadi di kab.Karo sebesar 0,098% dan Labuhan Batu Selatan sebesar 0,108%. Tahun 2012 ketimpangan ekonomi tertinggi terjadi di Samosir diangka 0,447 dan Gunung Sitoli diangka 0,413 dan sementara ketimpangan ekonomi yang paling rendah terjadi di kab.Labuhanbatu Selatan diangka 0,214. Tahun 2012 ketimpangan ekonomi tertinggi terjadi di Tapanuli Tengah diangka 0,327 dan Gunung Sitoli diangka 0,317 dan sementara ketimpangan ekonomi yang paling rendah terjadi di kab.Labuhanbatu Selatan diangka 0,170.

4. Gambaran Umum Jumlah Tindak Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara

Tindak kriminalitas yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota sesuai jumlah kasus tindak criminal di Kabupaten/kota mulai tahun 2002 sampai dengan 2013.

Tabel 5
Jumlah Tindak Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara

Provinsi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sumatera Utara	15.063	17.530	20.924	25.111	27.785	28.642	26.185	26.597	33.227	37.610	33.250	40.790

Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Tahun 2013 merupakan tingkat kriminalitas paling tinggi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 40.709 kasus lalu menurun di tahun berikutnya tahun 2012 sebesar 33.250 kasus dan kembali mengalami peningkatan tahun 2011 sebesar 37.610 kasus.

Tindak kriminalitas yang tertinggi adalah kasus pencurian sebanyak 8.343 tahun 2012, tingginya pengangguran maka akan semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan maka akan menyebabkan semakin banyaknya orang yang melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan.

Tabel 6
Jumlah Tindak Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013
Nias	854	1632	1.129	1.101
Mandailing natal	726	1384	1179	875

Tapanuli Selatan	988	1051	1270	1275
Tapanuli Tengah	832	1241	881	678
Tapanuli Utara	821	1432	1215	983
Toba Samosir	416	794	630	485
Labuhan Batu	847	1052	1417	3691
Asahan	476	852	921	417
Simalungun	1046	1548	1246	1141
Dairi	853	971	508	494
Karo	654	832	640	466
Deli Serdang	714	1359	1512	2664
Langkat	1028	2204	1896	1759
Nias Selatan	638	1280	1173	970
Humbang Hasundutan	492	1017	892	622
Pakpak Bharat	421	873	570	469
Samosir	463	983	575	310
Serdang Bedagai	1095	1194	1259	1054
Batubara	715	1129	1082	648
Padang Lawas Utara	584	1031	387	253
Padang Lawas	379	671	454	292
Labuhan Batu Selatan	874	1241	1154	671
Labuhan Batu Utara	763	1183	1146	745
Nias Utara	530	874	663	630
Nias Barat	872	1015	890	402
Sibolga	675	921	731	478
Tanjung Balai	432	571	398	379
Pematang Siantar	456	1347	840	522
Tebing Tinggi	1178	1159	1219	1016
Medan	12292	10187	13783	13985
Binjai	1092	1171	857	738
Padang Sidempuan	658	651	674	781
Gunung Sitoli	472	401	403	344
Sumatera Utara	33.227	37.610	33.250	40.709

Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Tindak Kriminalitas paling tinggi terjadi di Kota Medan dengan tindak criminal yang terus mengalami peningkatan tahun 2010 tindak criminal di Kota Medan sebesar 12.292 kasus mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 10.187 kasus tetapi kembali meningkat tahun 2012 dan 2013 masing sebesar 13.783 kasus tahun 2012 dan 13.985 kasus tahun 2012.

Tindak Kriminal yang tinggi juga terjadi di kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Simalungun. Tindak Kriminal di kabupaten Langkat meningkat tahun 2011 sebesar 2.204 kasus sedangkan Kabupaten Deli Serdang meningkat tahun 2013 sebesar 2.664 kasus, sedangkan di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Simalungun tindak criminal meningkat pada tahun 2012 sebesar 1.896 kasus di kabupaten Langkat dan tahun 2011 sebesar 1.548 kasus di Kabupaten Simalungun.

5. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat frekuensi data independen dan dependen variabel data, serta sebaran data pada tingkat maksimum dan minimum dari data. Adapun hasil pengujian sebagai berikut :

Tabel 7
Statistik Deskriptif Model Kriminalitas

	Gini Ratio	Kriminalitas
Mean	0.323000	27719.42
Median	0.323500	27191.00
Maximum	0.354000	40709.00
Minimum	0.288000	15063.00
Std. Dev.	0.021084	7680.756
Skewness	0.064308	0.015596
Kurtosis	1.954491	2.237484
Jarque-Bera	0.554815	0.291202
Probability	0.757746	0.864503
Sum	3.876000	332633.0
Sum Sq. Dev.	0.004890	6.49E+08
Observations	12	12

Sumber : E-Views 8 dan diolah

Dari hasil statistik deskriptif di atas, menunjukkan bahwasannya sepanjang tahun 2002-2013, nilai mean dari variabel GR (Gini Ratio) 0,323 artinya Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara senilai 0,323 setiap tahunnya. Nilai mean variabel K (Kriminalitas) sebesar 27719,42 artinya bahwa dalam pertahun kriminalitas bernilai 27719,42. Nilai skewness dari 1 variabel bebas dengan 1 variabel terikat, dengan syarat normal apabila nilai skewness sebesar $-2 \leq 2$, maka variabel GR (Gini Ratio) data tersebut normal, sedangkan variabel K (Kriminalitas) data tersebut tidak normal.

6. Hasil Analisis Regresi

Tabel 8
Regresi Sederhana Model Kriminalitas

Dependent Variable: K
Method: Least Squares
Date: 03/07/16 Time: 17:46
Sample: 2002 2013
Included observations: 12

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-79378.66	15441.50	-5.140606	0.0004
GR	331573.0	47713.41	6.949262	0.0000
R-squared	0.828451	Mean dependent var		27719.42
Adjusted R-squared	0.811296	S.D. dependent var		7680.756
S.E. of regression	3336.529	Akaike info criterion		19.21426
Sum squared resid	1.11E+08	Schwarz criterion		19.29508
Log likelihood	-113.2856	Hannan-Quinn criter.		19.18434
F-statistic	48.29224	Durbin-Watson stat		1.613991
Prob(F-statistic)	0.000040			

Sumber : E-Views 8 dan diolah

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 8.0 diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.828451. Angka ini menunjukkan bahwa variabel independen Ketimpangan ekonomi mampu menjelaskan variasi atau perubahan pada Tingkat Kriminalitas hingga sebesar 0,81%. Variabel-variabel lain di luar model mampu menjelaskan variasi atau perubahan variabel dependen hanya sebesar 0,19%.

b. Korelasi (R)

Dari hasil regresi pada model K (variabel-variabel yang mempengaruhi Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara) menunjukkan bahwasannya variable GR = Positif dan signifikan terhadap Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara.

Gini Ratio memiliki hubungan yang positif karenan nilai koefisien bernilai 0,91019284 dan signifikan karena nilai *probability* dari Gini Ratio 0,0000 (dibawah 0,05).

c. Interpretasi Hasil

Dari data yang diperoleh maka persamaan regresi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan hasil Autoregresi sebagai berikut:

$$K_t = -79378.66 + 331573.0GR_t + \epsilon_t$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat dibuat sebuah interpretasi model atau hipotesa yang diambil melalui hasil regresi ini yaitu :

- Bahwa Variabel Gini Ratio mempunyai pengaruh positif terhadap Kriminalitas, sebab nilai koefisien variabel Gini Ratio lebih besar ($>$) dari 5% yaitu 331573.0. Artinya apabila nilai Gini Ratio dinaikkan sebesar 1, maka akan menambah tingkat kriminalitas Provinsi Sumatera Utara.
- Konstanta dan Intersep

Di dalam hasil estimasi data dalam model regresi variabel yang mempengaruhi kriminalitas Provinsi Sumatera Utara, terdapat nilai konstanta sebesar 79378,66 yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat nilai rata-rata Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara berkecendrungan turun ketika variabel penjelas tetap. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen, akan dijelaskan sebagai berikut :

- **Gini Ratio (GR)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien untuk variabel (GR) adalah 331573.0 dimana variabel tersebut, berpengaruh signifikan terhadap Kriminalitas (K) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 6.949262$ dan nilai *probability* sebesar 0,0000 (dibawah 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan GR dengan Kriminalitas (K) di Provinsi Sumatera Utara adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan jika ketimpangan ekonomi (*Gini Ratio*) naik sebesar 1 maka Kriminalitas akan mengalami kenaikan sebesar 0.0004 . Oleh sebab itu variabel GR terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

d. Pengujian

- **Uji-t Statistik atau uji parsial**

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan uji t-statistik. Pengujian parsial dari setiap variabel independen akan menunjukkan pengaruh dari variabel independen, yaitu Ketimpangan Ekonomi terhadap variabel dependen, yaitu Jumlah Tindak Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara. pengujian uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai *Probability* pada tabel hasil regres bernilai 0,000 yang artinya Ketimpangan Ekonomi berpengaruh terhadap Jumlah Tindak Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara atau juga dapat melakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Dimana nilai t_{tabel} diperoleh dari ;df (n-k). Nilai $t_{tabel} = (\alpha = 0,05 : df = 11) = 2,306$.

Berdasarkan tabel hasil regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 6.949262 sehingga diperoleh hasil t-hitung (6,949262)>t-tabel (2,20099), maka keputusannya adalah hipotesis nol (H_0) ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil dari uji t tersebut menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif terhadap jumlah tindak kriminalitas dan korelasi sesuai dengan hipotesis serta signifikan secara statistik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ketimpangan ekonomi berpengaruh nyata terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

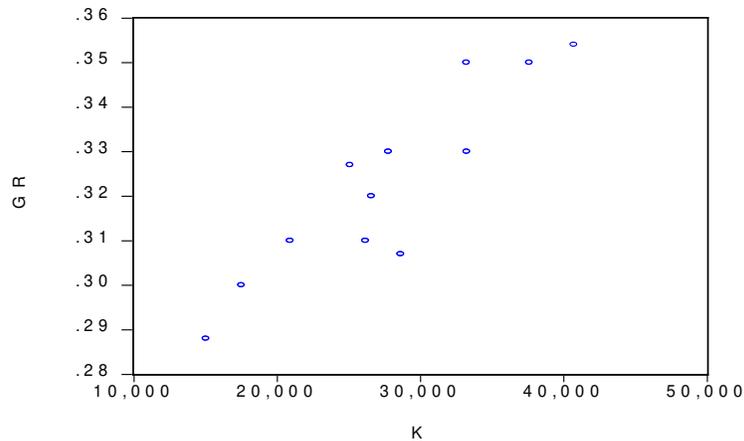
- **Uji Asumsi Klasik**

- 1). **Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Jika terjadi kolerasi, maka terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Masalah multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat dari hasil analisa dimana nilai R^2 regresi model utama 0.828451 lebih besar daripada nilai R^2 regresi parsial 0.05, maka dikatakan model yang diteliti bebas dari masalah multikolinieritas.

- 2). **Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisis heterokedastisitas sebagai berikut :



Sumber : Eviews 8 dan diolah

Gambar 3
Scatterplot of Kriminalitas

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tetapi membentuk pola garis lurus walaupun tidak sejajar serta tersebar keatas, samping dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

3). Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistic *Durbin Watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Pada model K setelah dilakukan uji *autoregressive* diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1.613991 artinya pada model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga model bisa diestimasi melalui variabel bebas yang digambarkan oleh variabel GR (Gini Ratio). Dimana standar suatu model dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai *Durbin Watson* yang diperoleh $1,54 < du < 2,46$.

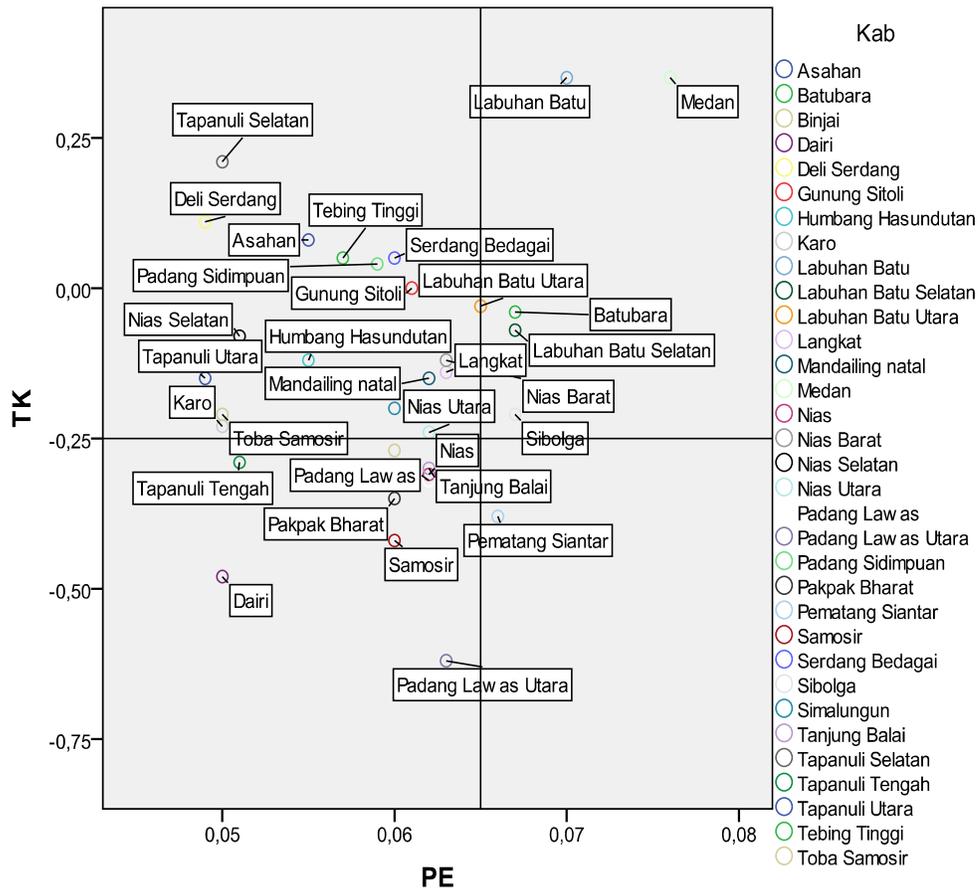
- **Analisis Tipologi Klassen**

Klasifikasi daerah pernah dibuat Leo Klassen (1981) dalam makalahnya yang berjudul “*Regional Dynamics*”. Tipologi klassen digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tipologi daerah terutama tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah (Kabupaten/Kota).

1). Analisis Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Tindak Kriminalitas

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kriminalitas. Dengan menentukan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu vertikal dan tingkat kriminalitas sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah per kabupaten/kota dibagi menjadi empat golongan yaitu kabupaten/kota yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), kabupaten/kota maju tapi tertekan (*high income but low growth*), kabupaten/kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*) dan kabupaten/kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Daerah yang diamati dalam penelitian ini merupakan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan pengklasifikasian menjadi empat kuadran, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High Growth and High Income*), daerah maju tapi pertumbuhan ekonominya lambat (*High Income but Low Growth*), daerah berkembang cepat (*High Growth*

but Low Income) dan daerah relatif tertinggal (Low Growth and Low Income). Penerapan analisis ini dilakukan dengan menghitung rata-rata PDRB Perkapita tahun 2012 dan tingkat kriminalitas tahun 2012.



Sumber : SPSS dan diolah

Gambar 4

Analisis Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Tindak Kriminalitas

Tabel 9

Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Pertumbuhan Ekonomi (r)	Jumlah Tindak Kriminalitas(Y)	
	(y1>1.131)	(y1<1.131)
(r1>28.036.879,18)	(Kuadran I) Kabupaten Labuhanbatu Kota Medan Labuhanbatu Selatan Batubara Nias Barat Sibolga	(Kuadran II) Tapanuli Selatan Deli Serdang Tebing Tinggi Asahan Labuhanbatu Utara Serdang Bedagai Padang Sidempuan Gunung Sitoli

Pertumbuhan Ekonomi (r)	Jumlah Tindak Kriminalitas(Y)	
	(y1>1.131)	(y1<1.131)
		Nias Selatan Tapanuli Utara Mandailing Natal Nias Utara Karo Toba Samosir Nias Langkat Binjai
(r1<28.036.879,18)	(Kuadran III) Tapanuli Tengah Pakpak Barat Samosir Dairi Tanjung Balai Padang Lawas Utara Simalungun	(Kuadran IV) Pematang Siantar Binjai Simalungun

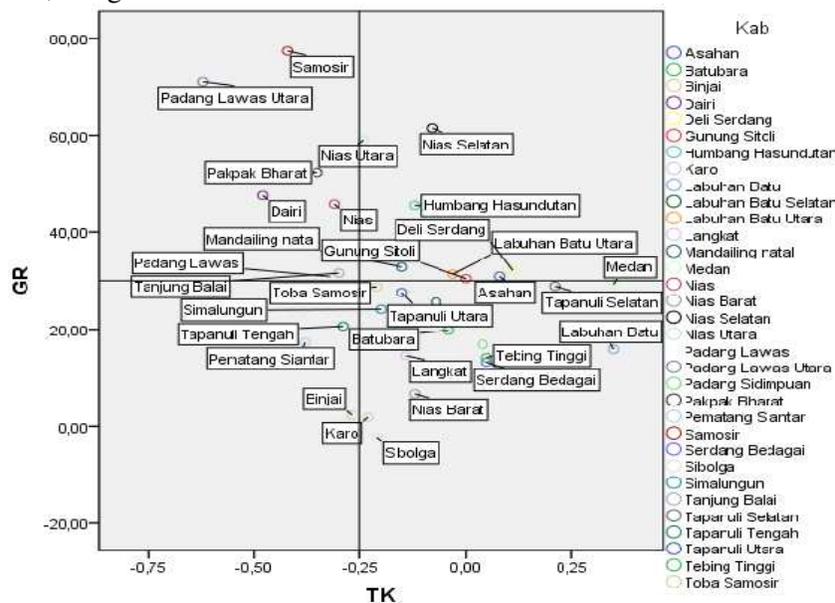
Berdasarkan hasil analisis tipologi klasen yang tertera pada gambar 4 dimana Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota dibagi 4 kuadran berdasarkan pada laju pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Kriminalitas. Hasil klasifikasi per kabupaten/kota pada tahun 2012 dapat diperoleh sebagai berikut :

- a. Kuadran I : Kabupaten/kota yang cepat maju dan cepat tumbuh dengan kriteria rata rata Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang lebih besar dari Pertumbuhan ekonomi Provinsi sebesar 28.036.879,18 dan tingkat kriminalitas rata-ratanya lebih besar dari 1.131 meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kota Medan, Labuhanbatu Selatan, Batubara, Nias Barat, Sibolga
- b. Kuadran II : Daerah yang berkembang cepat (*growing region*), yaitu kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tetapi tingkat kriminalitasnya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Provinsi 28.036.879,18 dan tingkat kriminalitas rata-ratanya 1.131 meliputi Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Asahan, Labuhanbatu Utara, Serdang Bedagai, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Nias Utara, Karo, Toba Samosir, Nias, Binjai.
- c. Kuadran III : Daerah maju tetapi tertekan (*retared region*), yaitu kabupaten/kota yang tingkat kriminalitasnya lebih tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Provinsi 28.036.879,18 dan tingkat kriminalitas rata-ratanya 1.131 meliputi Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Samosir, Dairi, Tanjung Balai, Padang Lawas Utara, Simalungun.
- d. Kuadran IV : Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), yaitu kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan tingkat kriminalitasnya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata Pertumbuhan ekonomi Provinsi 28.036.879,18 dan tingkat kriminalitas rata-ratanya 1.131 meliputi Pematang Siantar.

- **Analisis Tipologi Klassen Berdasarkan Ketimpangan Ekonomi dan Jumlah Tindak Kriminalitas**

Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas yang tertera pada grafik IV.3 dapat dimana Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota dibagi 4 kuadran berdasarkan pada laju pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Kriminalitas. Hasil klasifikasi per kabupaten/kota pada tahun 2012 dapat diperoleh sebagai berikut :

- Kuadran I : Kabupaten/kota yang cepat maju dan cepat tumbuh dengan kriteria rata rata ketimpangan ekonomi kabupaten/kota yang lebih besar dari ketimpangan ekonomi Provinsi sebesar 0,336 dan tingkat kriminalitas rata-ratanya lebih besar dari 1.131 meliputi Nias Selatan, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Gunung Sitoli, Labuhanbatu Utara, Asahan, Mandailing Natal.
- Kuadran II : Daerah yang berkembang cepat (*growing region*), yaitu kabupaten/kota yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi lebih tinggi, tetapi tingkat kriminalitasnya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata Ketimpangan ekonomi Provinsi 0,036 dan tingkat kriminalitas rata-ratanya 1.131 meliputi Samosir, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Nias, Dairi.
- Kuadran III : Daerah maju tetapi tertekan (*retared region*), yaitu kabupaten/kota yang tingkat kriminalitasnya lebih tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata Ketimpangan ekonomi Provinsi 0,036 dan tingkat kriminalitas rata-ratanya 1.131 meliputi Tapanuli Utara, Pematang Siantar, Binjai.
- Kuadran IV : Daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), yaitu kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan tingkat kriminalitasnya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata Ketimpangan ekonomi Provinsi 0,036 dan tingkat kriminalitas rata-ratanya 1.131 meliputi Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Simalungun, Karo, Serdang Bedagai, Toba Samosir, Medan, Padang Lawas, Nias Barat, Tebing Tinggi, Padang sidempuan, Toba Samosir, Labuhanbatu, Langkat



Sumber : SPSS dan diolah

Grafik 5

Analisis Tipologi Klassen Ketimpangan Ekonomi (*Gini Ratio*) dan Jumlah Tindak Kriminalitas

Tabel 10
Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012

Jumlah Tindak Kriminalitas(Y) Ketimpangan Ekonomi (r)	(y1>0,336)	(y1<0,336)
(r1>1.131)	(Kuadran I) Nias Selatan Nias Utara Humbang Hasundutan Deli Serdang Gunung Sitoli Labuhanbatu Utara Asahan Mandailing Natal	(Kuadran II) Samosir Padang Lawas Utara Pakpak Barat Nias Dairi Tanjung Balai
(r1<1.131)	(Kuadran III) Tapanuli Utara Pematang Siantar Binjai	(Kuadran IV) Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Simalungun, Karo, Serdang Berdagai, Toba Samosir, Medan, Padang Lawas, Nias Barat, Tebing Tinggi, Padang sidempuan, Toba Samosir, Labuhanbatu, Langkat

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perkembangan ekonomi yang dilihat dari PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dilihat dari data tahun terakhir yang merupakan angka tertinggi sebesar 30 482 590,52, adapun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera nilai PDRB per kapita selama tahun pengamatan juga mengalami peningkatan nilai PDRB yang tertinggi terdapat di Kota Medan dengan angka 53 623967,96. Ketimpangan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang dilihat dari *Gini Ratio* selama tahun pengamatan berada di angka 0,35 yang artinya pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara relative merata, dan nilai *Gini Ratio* tertinggi menurut kabupaten/kota selama tahun pengamatan terjadi di Samosir dengan angka 0,447.
2. Perkembangan Kriminalitas Provinsi Sumatera Utara selama tahun pengamatan menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dilihat dari data tahun terakhir yang merupakan angka tertinggi sebesar 40.709, adapun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera tingkat kriminalitas selama tahun pengamatan juga mengalami peningkatan tingkat kriminalitas yang tertinggi terdapat di Kota Medan dengan angka 13.985.
3. Ketimpangan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kriminalitas. Sehingga ketika ketimpangan ekonomi naik maka akan diikuti dengan peningkatan tingkat kriminalitas di Provinsi Sumatera Utara.

Saran

1. Pemerintah khususnya kepolisian daerah harus lebih memperhatikan tindak kriminalitas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, tingkat kriminalitas yang tinggi menandakan

tingkat keamanan yang rendah di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan sehingga akan menyebabkan penduduk dari Negara atau Provinsi lain takut untuk berkunjung ke Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Fadilla (2011), *Teori Kriminalitas*. Diakses 28 Desember 2015, <http://fadillaazhar.blogspot.com/2011/03/kriminalitas>.
- Anata, Firdaus (2013), *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk dan Index Williamson Terhadap Tingkat Kriminalitas*, Malang.
- Christian, Lumenta, Jhon S, Kekenusa dan Djoni Hatidja (2009), *Analisis Jalur Faktor-Faktor Penyebab Kriminalitas*. Manado.
- Djalal, Nachrowi dan Hardius Usman (2008), *Penggunaan Teknik Ekonometrik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Donny, Suryana (2013), *Analisis Perencanaan Pembangunan dalam Upaya pengurangan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Jember Tahun 2006-2011*. Jember.
- Gujarati, Damodar, (2003). *Basic Ekonometrik (Ekonometrika Dasar) edisi keempat*. Mc Graw-Hill / Irvin.
- Hamzah, Andi (1986), *Kamus Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Harahap, Ashani Nurul (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Sumatera Utara (Melalui Pendekatan Ekonomi)*. Medan.
- Hendry, Davy (2014), *Kriminalitas: Sebuah Sisi Gelap Dari Ketimpangan Distribusi Pendapatan*. Padang.
- Kartono, Kartini (1994), *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Maju Mundur
- Kuncoro, Mudrajat (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Santoso, Topo dan Eva Achjani (2001). *Kriminologi Edisi I*. Jakarta: Rajawali Persada
- Soerodibroto, Soenarto (1996). *KUHP dan KUHP Kriminalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiarti, Yayuk. *Kemiskinan Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kriminalitas*. Sumenep
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11. Jakarta Erlangga.
- Yudho, Dito Arsono (2014). *Pengaruh Variabel Pendidikan, Pengangguran, Rasio Gini, Usia, dan Jumlah Polisi Perkapita Terhadap Angka Kejahatan Property*. Semarang.